
PERGESERAN DARI OFFSHORING KE FRIEND-SHORING: PENATAAN ULANG STRATEGIS RANTAI NILAI GLOBAL DALAM MENGHADAPI FRAGMENTASI GEOPOLITIK DUNIA

Aldi Adi Pratama¹**Manajemen Industri, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat¹**E-mail : aldiadipratama20839aldi@apps.ipb.ac.id**ABSTRACT**

The world is currently witnessing a fundamental transformation in the global economic architecture, marked by a shift from the paradigm of offshoring driven by extreme cost efficiency toward "friend-shoring," which prioritizes national resilience and security. This study aims to analyze the impact of geopolitical fragmentation on Global Value Chains (GVCs) and how countries like Indonesia navigate these strategic shifts. Employing a mixed-methods approach, this research combines qualitative analysis through a literature review with quantitative methods, including a general equilibrium framework, Dynamic Factor Model (DFM), and Structural Vector Autoregressions (SVAR) to simulate the impact of trade cost variations on aggregate output. The findings indicate that while friend-shoring may mitigate the risks of economic coercion, such policies carry significant consequences, including a potential decline in global GDP ranging from 4.5% to over 10%, and triggering long-term inflationary pressures due to rising input costs and local labor wages. However, amidst this fragmentation, opportunities arise through the "China Plus One" (C+1) strategy, which encourages investment relocation to Southeast Asia. Indonesia has capitalized on this momentum through industrial downstreaming policies, particularly in nickel, and by strengthening economic sovereignty through Local Currency Transaction (LCT) initiatives to reduce dependence on specific global currencies. In conclusion, the transition toward a polarized world order requires Indonesia to implement principles of active neutrality and legal certainty to maintain its strategic position within the future restructuring of global value chains.

Keyword: China Plus One, Friend-shoring, Geopolitical Fragmentation, Global Value Chains, Indonesia, Offshoring

ABSTRAK

Dunia saat ini sedang menyaksikan transformasi fundamental dalam arsitektur ekonomi global, di mana terjadi pergeseran dari paradigma *offshoring* yang berbasis efisiensi biaya ekstrem menuju *friend-shoring* yang lebih memprioritaskan ketahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fragmentasi geopolitik terhadap rantai nilai global serta bagaimana negara seperti Indonesia menavigasi perubahan strategis ini. Dengan menggunakan metode campuran (*mixed methods*), penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif melalui studi literatur dengan pendekatan kuantitatif menggunakan kerangka ekuilibrium umum, *Dynamic Factor Model* (DFM), dan *Structural Vector Autoregressions* (SVAR) untuk mensimulasikan dampak perubahan biaya perdagangan terhadap *output* agregat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *friend-shoring* dapat memitigasi risiko koersi ekonomi, kebijakan ini membawa konsekuensi besar berupa potensi penurunan PDB global antara 4,5% hingga lebih dari 10%, serta memicu tekanan inflasi jangka panjang akibat kenaikan biaya input dan upah tenaga kerja lokal. Namun, di tengah fragmentasi ini, muncul peluang melalui strategi *China Plus One* (C+1) yang mendorong relokasi investasi ke Asia Tenggara. Indonesia memanfaatkan momentum ini melalui kebijakan hilirisasi industri, khususnya nikel, serta memperkuat kedaulatan ekonomi melalui inisiatif *Local Currency Transaction* (LCT) untuk mereduksi ketergantungan pada mata uang global tertentu. Kesimpulannya, transisi menuju tatanan dunia yang terpolarisasi menuntut Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip netralitas aktif dan kepastian hukum guna menjaga posisi strategisnya dalam restrukturisasi rantai nilai global masa depan.

Kata Kunci : China Plus One, Fragmentasi Geopolitik, Friend-shoring, Indonesia, Offshoring, Rantai Nilai Global.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang menyaksikan transformasi fundamental dalam arsitektur ekonomi global yang telah bertahan selama lebih dari tiga dekade. Sejak berakhirnya Perang dingin, integrasi ekonomi internasional didorong oleh paradigma efisiensi biaya yang ekstrem, di mana perusahaan multinasional mengoptimalkan disparitas upah antarnegara melalui praktik *offshoring* (Platas-López & Cruz-Mejía, 2026). Namun, tatanan tersebut kini menghadapi tekanan besar akibat eskalasi fragmentasi geopolitik yang menggeser prioritas dari optimasi biaya menjadi ketahanan dan keamanan nasional (Colantone, 2025). Berbagai krisis global yang terjadi secara berurutan, seperti perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, pandemi COVID-19, dan invasi Rusia ke Ukraina, telah menyingkap kerentanan fundamental dalam Rantai Nilai Global (*Global Value Chains*) yang selama ini dianggap stabil (Harsch & Lee, 2025).

Fragmentasi geopolitik didefinisikan sebagai pergeseran dari pendekatan kooperatif yang berpusat pada sistem perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO) menuju kebijakan sepihak dan perdagangan berbasis blok (Colantone, 2025). Fenomena ini bukan sekadar perlambatan integrasi, melainkan sebuah restrukturisasi peta ekonomi dunia yang didasarkan pada garis keberpihakan politik dan keselarasan nilai-nilai bersama (Javorcik et al., 2023). Dalam konteks tersebut, muncul istilah *friend-shoring* sebagai strategi baru bagi negara dan korporasi untuk merelokasi produksi serta pengadaan input ke negara-negara mitra yang memiliki keselarasan strategis (Harsch & Lee, 2025).

Fenomena yang dikenal luas di kalangan ilmuwan sebagai *economic turn* menandai perubahan besar dalam pola hubungan internasional. Dalam konteks ini,

ekonomi tidak lagi sekadar instrumen kesejahteraan, melainkan telah bergeser menjadi alat strategis demi mencapai tujuan geopolitik tertentu. Prioritas keamanan nasional kini lebih mendominasi logika ekonomi global, sehingga efisiensi pasar kerap dikesampingkan demi meminimalisir risiko strategis (da Rocha, da Fonseca, & Kogut, 2025). Hal ini diperburuk oleh kekhawatiran terhadap ketergantungan pada negara rival untuk komoditas vital seperti mineral penting dan semikonduktor, yang kini dikategorikan sebagai ancaman keamanan yang serius (Attinasi et al., 2024). Akibatnya, negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Jepang, AS, dan Uni Eropa mulai memfokuskan kebijakan mereka pada strategi *de-risking* dan *de-coupling* (Zhou, Su, & Yuan, 2024).

Di kawasan Asia Tenggara, dinamika tersebut menciptakan tantangan sekaligus peluang yang signifikan. Fenomena *China Plus One* (C+1) mengindikasikan bahwa korporasi global tidak lagi bersedia memusatkan seluruh investasi mereka di Tiongkok akibat risiko geopolitik dan eskalasi biaya domestik. Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN, berada di pusat dinamika ini dan berupaya menavigasi trilema antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, serta netralitas geopolitik di tengah fragmentasi yang kian mendalam (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025). Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai pergeseran tersebut menjadi krusial untuk memahami proyeksi tatanan dunia masa depan serta strategi negara-negara berkembang dalam memposisikan diri dalam rantai nilai yang sedang bertransformasi ini. Keberhasilan menjaga kelangsungan bisnis lintas negara menuntut adanya sinergi antara aspek hukum yang inklusif, strategi ekonomi nasional, dan kebijakan luar negeri yang saling mendukung satu sama lain (Venessa, 2025).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang unik. Ketegangan geopolitik secara langsung mempengaruhi arus investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia, sehingga memerlukan strategi adaptasi yang tepat (Zaza et al., 2025). Di satu sisi, Indonesia berisiko terjepit dalam tekanan politik antar blok, namun di sisi lain terdapat peluang besar untuk menarik relokasi investasi melalui strategi *China Plus One*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak fragmentasi geopolitik terhadap struktur GVC dan mengevaluasi bagaimana posisi strategis Indonesia dalam menavigasi perubahan tersebut. Melalui pendekatan *mixed-methods*, studi ini akan membedah konsekuensi ekonomi dari kebijakan *friend-shoring* sekaligus merumuskan respons kebijakan yang optimal bagi ketahanan ekonomi nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Evolusi dari *Offshoring* ke *Friend-shoring*

Selama puluhan tahun, efisiensi biaya menjadi penggerak utama munculnya strategi *offshoring*, di mana perusahaan memindahkan fasilitas produksi mereka ke mancanegara (Juneja, 2025). Pendekatan ini berpijak pada teori keunggulan komparatif, yang mengarahkan distribusi modal dan teknologi ke wilayah dengan upah buruh kompetitif demi mendukung produksi massal (Platas-López & Cruz-Mejía, 2026). Meski demikian, fokus berlebih pada efisiensi ini kerap mengorbankan aspek ketahanan (*resilience*). Rantai pasok yang terlalu panjang dan terkonsentrasi secara geografis menciptakan kerentanan, di mana satu gangguan lokal saja dapat bereskalasi menjadi krisis sistemik global (Harsch & Lee, 2025).

Teori Proksimitas Multidimensi dan Geopolitik

Keputusan pemilihan lokasi dalam era fragmentasi tidak lagi dapat dianalisis secara memadai hanya melalui model biaya transportasi konvensional. Literatur terkini menyarankan penggunaan kerangka proksimitas multidimensi yang mencakup dimensi geografis, institusional, organisasional, sosial, kognitif, dan fungsional (Platas-López & Cruz-Mejía, 2026). Dalam konteks *friend-shoring*, proksimitas institusional menjadi variabel yang paling determinan. Kesamaan dalam sistem hukum, standar hak asasi manusia, serta norma demokrasi dipandang sebagai jaminan terhadap risiko persenjataan perdagangan (*weaponization of trade*) oleh negara mitra (Harsch & Lee, 2025).

Relevansi fenomena ini berkaitan erat dengan konsep interdependensi yang dipersenjatai (*weaponized interdependence*). Teori ini mengemukakan bahwa negara-negara berkekuatan besar dapat memanfaatkan posisi sentral mereka dalam jaringan global sebagai instrumen tekanan politik terhadap negara lain. Sebagai langkah antisipatif, negara maju mulai mengimplementasikan kebijakan *de-risking*, yaitu sebuah strategi mitigasi terhadap potensi koersi ekonomi. Langkah ini ditempuh melalui diversifikasi jalur perdagangan serta penguatan aliansi strategis dengan negara-negara mitra yang memiliki keselarasan dalam kepentingan keamanan nasional (Zhou, Su, & Yuan, 2024).

Ekonomi Sirkular dan Keberlanjutan

Studi terbaru menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara strategi *x-shoring* dengan transisi menuju ekonomi sirkular. Penerapan *reshoring* maupun *backshoring* dalam merelokasi basis produksi dinilai mampu menciptakan rantai nilai yang lebih terlokalisasi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip utama ekonomi sirkular yang

menekankan pada efisiensi penggunaan material serta penurunan emisi karbon dari sektor transportasi (Stihl, Friedrich, & Grillitsch, 2025). Namun, tantangan muncul ketika kebijakan *friend-shoring* yang berorientasi pada keamanan justru bertolak belakang dengan sasaran keberlanjutan. Hal ini terlihat pada prioritas pasokan mineral dari sekutu geopolitik yang berisiko mengesampingkan standar lingkungan, khususnya untuk komoditas yang langka.

METODE PENELITIAN

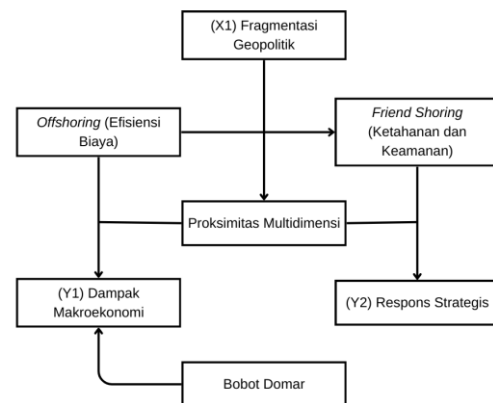
Penelitian ini menerapkan metode campuran (*mixed methods*) untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap dinamika fragmentasi global. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui kerangka kerja ekuilibrium umum (*general equilibrium framework*) untuk mensimulasikan dampak perubahan biaya perdagangan dan tarif terhadap output agregat. Secara simultan, pendekatan kualitatif digunakan melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan guna mengkontekstualisasikan pergeseran paradigma geopolitik, seperti strategi *friend-shoring* dan *de-risking*.

Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengukur besaran dampak ekonomi secara numerik, tetapi juga memahami motivasi strategis di balik transformasi arsitektur ekonomi global tersebut. Model yang digunakan mengadopsi pendekatan multi-sektor dan multi-negara yang dirancang untuk menangkap interdependensi kompleks dalam rantai nilai global. Struktur matematis model ini dibangun berdasarkan fungsi produksi nested *Constant Elasticity of Substitution* (CES) dengan spesifikasi sebagai berikut.

- 1. Sisi Produksi : Pada sisi produksi, setiap industri mengombinasikan faktor tenaga kerja dan bundel input

antara dengan elastisitas substitusi sebesar $\phi = 0.6$. Bundel *input* antara tersebut selanjutnya tersusun atas berbagai komponen sektoral yang memiliki tingkat komplementaritas tinggi, yang direpresentasikan oleh elastisitas substitusi sebesar $\epsilon = 0.2$.

- 2. Sisi Konsumsi: Pada sisi konsumsi, rumah tangga mengalokasikan konsumsi antar sektor melalui struktur preferensi Cobb–Douglas dengan elastisitas substitusi $\sigma = 1$, yang mencerminkan proporsi pengeluaran konsumsi yang konstan pada masing-masing sektor.
- 3. Bobot Domar : Model ini mengintegrasikan Bobot Domar ($d\lambda$) untuk mengukur dampak total dari perubahan biaya perdagangan terhadap *output* agregat, sehingga memungkinkan penelusuran efek langsung maupun tidak langsung melalui keterkaitan antar sektor dan antar negara.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Fenomena utama yang menjadi pemicu dalam model ini adalah Fragmentasi Geopolitik (X1). Fragmentasi ini, yang ditandai oleh peningkatan risiko politik, pembatasan perdagangan, dan sanksi ekonomi, mendorong terjadinya perubahan paradigma fundamental dalam operasional bisnis

internasional, yaitu pergeseran dari praktik *offshoring* yang berbasis efisiensi biaya menuju strategi *Friend-shoring* yang mengutamakan ketahanan dan keamanan nasional. Dalam proses transisi tersebut, pemilihan lokasi relokasi industri tidak lagi hanya didasarkan pada keunggulan komparatif biaya tenaga kerja, melainkan sangat ditentukan oleh kriteria Proksimitas Multidimensi. Perusahaan multinasional kini memprioritaskan negara mitra yang memiliki kedekatan secara institusional, hukum, dan keselarasan nilai-nilai politik untuk memitigasi risiko persenjataan perdagangan atau *weaponized interdependence*.

Konfigurasi ulang rantai nilai ini menghasilkan dua kelompok dampak utama sebagai variabel dependen. Secara global, transisi ini menimbulkan Dampak Makroekonomi (Y1) yang signifikan, termasuk potensi penurunan PDB riil dunia antara 4,5 persen hingga lebih dari 10 persen, serta tekanan inflasi jangka panjang akibat kenaikan biaya input industri dan upah tenaga kerja lokal. Besarnya guncangan terhadap *output* agregat global ini diukur secara kuantitatif melalui instrumen Bobot Domar dalam kerangka ekuilibrium umum, yang mampu menangkap keterkaitan kompleks antar sektor dan antar negara. Di sisi lain, fragmentasi ini juga membuka peluang bagi Respons Strategis Indonesia (Y2). Indonesia memanfaatkan momentum relokasi investasi melalui strategi China Plus One, penguatan hilirisasi komoditas strategis seperti nikel, serta peningkatan kedaulatan ekonomi melalui inisiatif *Local Currency Transaction* atau LCT untuk menjaga posisi strategis dalam tatanan dunia yang baru.

Metodologi ini memungkinkan simulasi berbagai skenario dunia yang terpolarisasi yang diimplementasikan melalui pemberian guncangan pada biaya perdagangan iceberg atau melalui penerapan tarif sebesar 20% antarblog ekonomi yang

saling bersaing (Javorcik et al., 2023). Untuk mengukur evolusi fragmentasi dari waktu ke waktu, peneliti menggunakan *Dynamic Factor Model* (DFM) dengan parameter yang bervariasi terhadap waktu dan volatilitas stokastik. Model ini mengkonsolidasikan indikator empiris seperti aliran modal, pembatasan perdagangan, risiko politik, dan sanksi menjadi satu faktor umum yang tidak teramati (Fernández-Villaverde, Mineyama, & Song, 2024). Setelah indeks ini dibentuk, analisis dampak kausal dilakukan menggunakan:

- a. *Structural Vector Autoregressions* (SVAR) : Digunakan untuk menilai bagaimana guncangan pada fragmentasi mempengaruhi variabel makroekonomi global (Fernández-Villaverde, Mineyama, & Song, 2024).
- b. *Local Projections* (LP) : Digunakan untuk memetakan respons dinamis PDB dan inflasi terhadap guncangan fragmentasi dalam jangka menengah (Fernández-Villaverde, Mineyama, & Song, 2024).

Data yang telah terkumpul kemudian disintesis dan dikategorikan ke dalam tabel perbandingan strategis. Proses pengolahan data bertujuan untuk mengidentifikasi pola pergeseran industri manufaktur dunia dan posisi tawar masing-masing negara dalam ekosistem perdagangan internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Estimasi Biaya Ekonomi dan Kerugian PDB

Adopsi kebijakan *friend-shoring* dan *reshoring* berfungsi sebagai proteksi terhadap ketidakpastian pasokan global, namun langkah ini harus dibayar dengan menurunnya efisiensi alokasi sumber daya secara internasional. Berbagai studi memproyeksikan penurunan PDB riil global melalui beberapa skenario berikut :

1. Skenario *Friend Shoring*: Pembatasan perdagangan hanya pada negara mitra sekutu diperkirakan menekan output global sebesar 0,1% hingga 4,7% (Harsch & Lee, 2025). Kerugian dapat diminimalisir jika negara-negara dalam blok yang sama mampu saling mensubstitusi kebutuhan *input* manufaktur mereka.
2. Skenario *Reshoring*: Pemindahan produksi kembali ke negara asal berdampak jauh lebih destruktif. Potensi kontraksi PDB global berkisar antara 4,5% hingga lebih dari 10%, dengan risiko tertinggi dialami oleh negara-negara dengan ekonomi terbuka kecil (Cerdeiro et al., 2024).
3. Skenario *Decoupling* Total: Jika terjadi pemutusan hubungan dagang secara menyeluruh antara blok Barat dan Timur, PDB dunia diprediksi merosot hingga 9% (Attinasi et al., 2024).

Dalam kondisi fragmentasi yang ekstrem, Tiongkok diprediksi akan menerima hantaman ekonomi terberat dengan potensi penurunan PDB mencapai hampir 20%. Di sisi lain, Negara-negara Barat juga tidak luput dari kontraksi signifikan karena kehilangan akses terhadap pasar konsumen yang besar serta pasokan input industri dengan biaya kompetitif (Attinasi et al., 2024).

Dampak terhadap Inflasi dan Kebijakan Moneter

Fragmentasi perdagangan internasional kini menjadi pendorong utama ketidakstabilan harga. Terbatasnya jumlah mitra dagang mengakibatkan guncangan pasokan terjadi lebih intens dan frekuentif (Attinasi et al., 2024). Fenomena ini mentransmisikan inflasi melalui tiga mekanisme utama:

1. Volatilitas Harga Relatif: Pembatasan akses terhadap komoditas strategis seperti energi dari Rusia atau mineral

kritis dari Tiongkok memaksa negara-negara mencari alternatif yang lebih mahal. Peralihan ini secara otomatis mengerek level harga agregat secara keseluruhan.

2. Tekanan di Sektor Ketenagakerjaan : Kebijakan *reshoring* yang membawa manufaktur kembali ke negara maju seringkali berbenturan dengan keterbatasan tenaga kerja lokal. Upah yang meningkat akibat kelangkaan pekerja pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk.
3. Persistensi Inflasi Jangka Panjang : Dalam kondisi *decoupling* yang ekstrem, inflasi global diproyeksikan melonjak hingga 4 poin persentase pada tahun pertama. Tekanan harga ini diperkirakan tetap bertahan pada level tinggi selama setidaknya lima tahun ke depan.

Bagi bank sentral, pergeseran struktural ini menciptakan kompleksitas baru dalam merumuskan kebijakan moneter. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan instrumen analitik yang lebih tajam agar mampu memisahkan antara fluktuasi harga temporer dengan perubahan harga struktural yang muncul akibat rekonfigurasi rantai pasok global.

Rekonfigurasi GVC dan Fenomena *China Plus One*

Pada tingkat korporasi, respons terhadap fragmentasi geopolitik termanifestasi dalam strategi *China Plus One* (C+1). Strategi ini tidak mengimplikasikan penarikan investasi secara menyeluruh dari Tiongkok, mengingat keunggulan ekosistem manufaktur serta skala pasar domestiknya yang signifikan. Sebaliknya, perusahaan mulai mendiversifikasi basis produksi dengan menambahkan setidaknya satu lokasi

manufaktur di negara lain sebagai upaya *de-risking* (Galani & Kanellopoulos, 2025). Faktor-faktor yang mendorong diversifikasi ini antara lain:

1. Eskalasi Biaya Tenaga Kerja: Upah riil di Tiongkok telah mengalami peningkatan signifikan, yang secara langsung meningkatkan daya saing komparatif negara-negara seperti Vietnam, India, dan Indonesia, terutama bagi sektor industri padat karya (Madden, 2025).
2. Eskalasi Ketegangan Geopolitik: Risiko pengenaan tarif tinggi oleh Amerika Serikat, seperti kebijakan tarif *Liberation Day* pada tahun 2025, telah mendorong korporasi global untuk mencari basis ekspor alternatif guna memitigasi hambatan perdagangan (Galani & Kanellopoulos, 2025).
3. Kepatuhan ESG dan Standar Hak Asasi Manusia: Implementasi regulasi ketat seperti *Uyghur Forced Labor Prevention Act* (UFLPA) telah mengarahkan korporasi multinasional untuk merestrukturisasi rantai pasok mereka. Langkah ini diambil guna memitigasi risiko reputasi serta konsekuensi hukum yang timbul dari keterkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang berlaku global (Madden, 2025).

Tabel 1 Perbandingan Peran Beberapa Negara Utama dalam Strategi C+1

Negara	Kekuatan Strategis	Fokus Industri Utama
Vietnam	Kedekatan geografis dengan Tiongkok dan jaringan perjanjian dagang	Manufaktur elektronik, produk tekstil, dan sektor teknologi.

Tabel 1 Perbandingan Peran Beberapa Negara Utama dalam Strategi C+1

Negara	Kekuatan Strategis	Fokus Industri Utama
	bebas (FTA) yang masif.	
India	Skala pasar internal yang sangat besar didukung subsidi pemerintah (<i>Production Linked Incentives</i>).	Produksi perangkat Apple (iPhone), perakitan semikonduktor, dan farmasi.
Malaysia	Ekosistem infrastruktur yang mapan serta posisi sebagai pusat semikonduktor dunia.	Proses <i>back-end</i> semikonduktor (pengujian dan pengemasan chip).
Meksiko	Lokasi strategis <i>nearshoring</i> untuk akses langsung ke pasar Amerika Serikat di bawah payung USMCA.	Industri otomotif dan manufaktur skala besar.

Sumber: Data diolah Oleh Penulis (2025)

Perang Chip dan Penurunan Kualitas Input

Sektor semikonduktor kini bertransformasi menjadi arena utama dalam rivalitas kekuatan besar dunia. Hal ini terbukti dari langkah Amerika Serikat yang mengimplementasikan pembatasan ekspor secara menyeluruh terhadap teknologi semikonduktor mutakhir guna menghambat kemajuan kapabilitas kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) Tiongkok (Cerdeiro et al., 2024). Kebijakan *de-risking* yang bersifat sektoral tersebut membawa konsekuensi berupa potensi penurunan kualitas input yang substansial. Berdasarkan proyeksi apabila terjadi pemutusan akses teknologi timbal

balik antara Tiongkok dan blok OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), Tiongkok diperkirakan akan menghadapi degradasi kualitas input sebesar 5%. Di sisi lain, blok OECD diprediksi hanya akan mengalami dampak negatif yang terbatas dalam jangka pendek, walaupun tetap dibayangi oleh risiko peningkatan biaya produksi akibat disrupsi rantai pasok tersebut.

Tantangan Makro Ekonomi dan Stabilitas

Fragmentasi ekonomi global telah menghambat akselerasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang pada gilirannya mengekspos Indonesia pada sejumlah risiko strategis:

1. **Divergensi Pertumbuhan:** Di tengah tren perlambatan ekonomi global dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 3,2% pada periode 2024 – 2025, Indonesia dipaksa untuk lebih mengandalkan kekuatan permintaan domestik. Hal ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang terkendala oleh fragmentasi perdagangan internasional serta pemberlakuan tarif tinggi di beberapa pasar ekspor utama (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025).
2. **Volatilitas Pasar Keuangan:** Ketidakpastian geopolitik yang persisten telah memicu fenomena aliran modal keluar (*capital flight*) menuju aset-aset aman (*safe-haven assets*). Dinamika ini memberikan tekanan depresiasi terhadap nilai tukar Rupiah dan menyebabkan kenaikan imbal hasil (*yield*) obligasi domestik (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025).
3. **Tekanan Inflasi Impor :** Eskalasi konflik di berbagai wilayah, seperti Timur Tengah dan Ukraina, telah memicu lonjakan harga pangan serta energi global. Kenaikan harga komoditas

esensial ini pada akhirnya menekan daya beli masyarakat Indonesia melalui transmisi inflasi impor (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Peluang melalui Hilirisasi dan *Friend-shoring*

Implementasi strategi hilirisasi industri (*downstreaming*), terutama pada komoditas nikel untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik, telah menempatkan Indonesia sebagai aktor krusial dalam struktur rantai nilai global masa depan. Di tengah fragmentasi geopolitik, Indonesia memposisikan diri sebagai destinasi *friend-shoring* yang strategis bagi kekuatan ekonomi Barat maupun Tiongkok, didukung oleh stabilitas politik nasional serta kebijakan pemerintah yang proaktif dalam memfasilitasi relokasi industri global.

Efektivitas kebijakan ini tercermin dalam performa sektor eksternal; nilai ekspor barang dan jasa Indonesia tetap solid dengan capaian sebesar US\$ 264,7 miliar pada tahun 2024, yang didorong secara signifikan oleh peningkatan nilai tambah komoditas hasil hilirisasi. Secara simultan, Indonesia memperkuat kedaulatan ekonominya melalui inisiatif *Local Currency Transaction* (LCT) dan integrasi sistem pembayaran lintas negara di kawasan ASEAN. Langkah ini merupakan strategi preventif untuk mereduksi ketergantungan pada mata uang global tertentu serta memitigasi risiko disrupsi di tengah meningkatnya fragmentasi sistem keuangan internasional (Kartikoyono et al., 2024).

KESIMPULAN

Transisi dari paradigma *offshoring* yang berbasis efisiensi menuju *friend-shoring* yang berorientasi pada keamanan menandai berakhirnya era globalisasi konvensional. Fragmentasi geopolitik telah membentuk

tatanan dunia yang terpolarisasi, di mana arus perdagangan dan investasi tidak lagi semata-mata mengikuti logika pasar, melainkan dikendalikan oleh aliansi strategis dan kepercayaan politik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun *friend-shoring* mampu memitigasi risiko koersi ekonomi dan gangguan pasokan sistemik, kebijakan ini memicu konsekuensi ekonomi yang substansial. Penurunan efisiensi global, potensi reduksi PDB hingga 9%, serta eskalasi tekanan inflasi merupakan kompensasi biaya demi tercapainya ketahanan yang lebih tinggi. Bagi ekonomi berkembang, risiko tersebut kian krusial mengingat potensi terhambatnya transfer teknologi serta integrasi ke dalam pasar global.

Namun, di tengah fragmentasi tersebut, muncul episentrum pertumbuhan baru. Strategi *China Plus One* (C+1) telah mengakselerasi aliran investasi ke kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Bagi Indonesia, keberhasilan dalam menavigasi era baru ini sangat bergantung pada implementasi prinsip netralitas aktif yakni memposisikan diri sebagai mitra andal bagi berbagai blok ekonomi sekaligus memperkuat basis industri domestik melalui program hilirisasi dan kepastian hukum. Kemampuan navigasi antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan keberlanjutan lingkungan, serta optimalisasi forum multilateral seperti ASEAN dan G20, akan menjadi determinan utama posisi Indonesia dalam restrukturisasi rantai nilai global. Sebagai langkah penutup, penguatan sistem keuangan domestik dan diversifikasi pasar ekspor tetap menjadi prioritas strategis untuk memitigasi dampak negatif dari tatanan global yang kian terfragmentasi

DAFTAR PUSTAKA

- Attinasi, M. G., Mancini, M., Boeckelmann, L., Bottone, M., Conteduca, F. P., Giordano, C., Meunier, B., Panon, L., Almeida, A. M., Balteanu, I., Bañbura, M., Bobeica, E., Borgogno, O., Borin, A., Caka, P., Campos, R., Carluccio, J., De Castro Martins, B., Di Casola, P., ... Viani, F. (2024). *Navigating a fragmenting global trading system: Insights for central banks* (ECB Occasional Paper Series No. 365). European Central Bank. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op365~362d801aee.en.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025–2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/394622/3%20th%202025.pdf>
- Cerdeiro, D. A., Kamali, P., Kothari, S., & Muir, D. V. (2024). *The price of de-risking reshoring, friend-shoring, and quality downgrading* (IMF Working Paper No. 2024/122). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400269646.001>
- Colantone, I. (2025, October 21). *De-globalization and fragmentation*. *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*. from <https://oxfordre.com/economics/view/10.1093/acrefore/9780190625979.001.0001/acrefore-9780190625979-e-1010>
- da Rocha, A., da Fonseca, L. N. M., & Kogut, C. S. (2025). *Deciphering relocation paths: A systematic literature review of near-shoring and friend-shoring*. *Journal of International Management*, 31(5), Article 101282. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2025.101282>

- Fernández-Villaverde, J., Mineyama, T., & Song, D. (2024). *Are we fragmented yet? Measuring geopolitical fragmentation and its causal effect* (NBER Working Paper No. 32638). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32638/revisions/w32638_rev0.pdf
- Galani, D. D., & Kanellopoulos, A. N. (2025). *China Plus One policy: A strategic approach amid de-escalation of trade tensions*. HAPSc Policy Briefs Series, 6(1), 134–141. <https://doi.org/10.12681/hapscpbs.43198>
- Harsch, M. F., & Lee, S. (2025, May 21). *Defusing weaponized interdependence: A new approach to measuring country reliability*. Joint Force Quarterly, 117. National Defense University Press. <https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/4158881/defusing-weaponized-interdependence-a-new-approach-to-measuring-country-reliabi/>
- Javorcik, B. S., Kitzmüller, L., Schweiger, H., & Yıldırım, M. A. (2023). *Economic costs of friend-shoring* (CESifo Working Paper No. 10869). CESifo; ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/282557/1/cesifo1_wp10869.pdf
- Juneja, H. (2025, April 3). *What are near-shoring and friend-shoring and why they matter for Western multinationals*. Management Study Guide. <https://www.managementstudyguide.com/near-shoring-and-friend-shoring.htm>
- Kartikoyono, D., Trianti, E., Hutabarat, D., Affandi, Y., Ponco, R., Safarina, D., Id, I. S. H., Harun, C. A., Hidayat, W. S., Mara Elyana, M. Y. I., & Widyasari, K. (Eds.). (2024). *ASEAN: Pusat pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan*. Bank Indonesia Institute. <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/publikasi/Documents/ASEAN-Pusat-Pertumbuhan-Inklusif-dan-Berkelanjutan.pdf>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). *Reviu informasi strategis: Oktober–Desember 2024*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-reviu-informasi-strategis-okt-des-2024.pdf>
- Madden, M. (2025, September 29). *Everything you need to know about China Plus One*. Z2Data. <https://www.z2data.com/insights/everything-you-need-to-know-about-china-plus-one>
- Platas-López, A., & Cruz-Mejía, O. (2026). *The nearshoring loop: A review of triggers, location choice, and captured outcomes*. Logistics, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/logistics1001001>
- Stihl, L., Friedrich, J., & Grillitsch, M. (2025). *X-shoring and the circular economy: Drivers, synergies, and geographic interrelations*. Economic Geography, 1–29. <https://doi.org/10.1080/00130095.2025.2589080>
- Venessa, C. (2025). *Implikasi ketegangan geopolitik terhadap stabilitas bisnis internasional: Pergeseran hegemoni tunggal menuju dunia multipolar*. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4), 11117–11131.
- Zaza, A. M. S. U., Banoet, R. Y., & Dima, E. T. Y. (2025). *Dampak ketegangan geopolitik terhadap investasi asing langsung (FDI) di Indonesia*. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 8(3), 949–

958.

<https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1175>

Zhou, J., Su, F., & Yuan, J. (2024). *De-risking: The EU's and Japan's approaches to managing economic relations with China* (SIPRI Research Policy Paper). Stockholm International Peace Research Institute.
<https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-02/de-risking.pdf>